

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor informal memiliki peran yang sangat besar di negara- negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Sektor informal merupakan sektor yang tidak terorganisasi, (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*) dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Di negara sedang berkembang sekira 30-70% populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal (Noeraini, 2016).

Data dari 47 negara di dunia terdapat 7 negara yang mempunyai jumlah pekerja sektor informal terbanyak yaitu India 150.113 ribu pekerja, China 24.220 ribu pekerja, Pakistan 20.416 ribu pekerja, Brazil 18.688 ribu pekerja, Filipina 15.680 ribu pekerja, Mexico 12.861 ribu pekerja dan Vietnam 10.948 ribu pekerja (ILO, 2012). Sedangkan di Indonesia dari 124,5 juta jiwa jumlah penduduk dengan status bekerja, diketahui sebanyak 51,8 juta jiwa (42%) bekerja pada sektor formal, dan 72,6 juta jiwa lainnya (58%) bekerja pada kegiatan informal. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa lebih besar penduduk yang bekerja pada sektor informal (BPS, 2017).

Keberhasilan usaha di sektor informal tentunya juga didukung oleh kesehatan kerja yang merupakan upaya untuk mengatasi masalah kesehatan akibat dari pekerjaan, sehingga meningkat produktivitas dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas kerja.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII Kesehatan Kerja pasal 164 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pada

ayat (2) menyebutkan bahwa Upaya Kesehatan Kerja meliputi pekerja di sektor formal dan informal.

Dalam Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 upaya pembangunan kesehatan Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah ditetapkan program upaya kesehatan, salah satunya yaitu peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui peningkatan akses masyarakat, termasuk pekerja terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta upaya ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan (Kemenkes RI, 2015).

Setiap tahun ada 270 juta pekerja di dunia mengalami kecelakaan akibat kerja (ILO, 2004). Lebih dari 2 juta kasus kematian tiap tahunnya dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sebanyak 300.000 orang meninggal dari 250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian karena penyakit akibat hubungan kerja (ILO, 2012). Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan sedikitnya 35 orang per 100.000 pekerja meninggal karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 145 orang per 100.000 orang pekerja mengalami cacat menetap dan 1.145 orang per 100.000 pekerja mengalami kecelakaan kerja dan 687 orang per 100.000 pekerja terkena penyakit akibat kerja (Kurniawidjaja, 2011).

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kesehatan kerja telah menyelenggarakan upaya kesehatan kerja pada sektor informal yaitu dengan di bentuknya Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK. Pos UKK merupakan wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas (Kemenkes RI, 2015).

Pos UKK dibentuk karena semakin meningkatnya jumlah pekerja dan sebagian besar belum mendapatkan pelayanan kesehatan kerja yang memadai, serta masih banyak tempat kerja yang belum melaksanakan kesehatan kerja. Juga tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dialami masyarakat pekerja semakin tinggi hingga mempengaruhi produktivitas kerjanya. Program Pos UKK ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat pekerja yang sehat dan produktif melalui peningkatan pengetahuan tentang kesehatan kerja, menerapkan perilaku hidup bersih, sehat dan selamat dalam bekerja, meningkatkan kemampuan masyarakat pekerja untuk menolong diri sendiri, dan mendekatkan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh kader (Kemenkes RI, 2015).

Fungsi Pos UKK adalah memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengobatan sederhana bagi masyarakat pekerja yang beresiko terpajan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri. Dalam penyelenggaraannya kegiatan pada Pos UKK tersebut dibina dan diawasi oleh Puskesmas.

Data dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI target pencapaian Pos UKK yang terbentuk di tahun 2017 adalah sebanyak 2.288 Pos UKK dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta target pencapaian di tahun 2017 adalah 34 Pos UKK dari jumlah 340 Puskesmas yang ada di wilayah DKI Jakarta. Di wilayah Kota Jakarta Barat menurut data dari Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat tercatat sudah 14 Pos UKK yang terbentuk sampai dengan bulan Juli 2017.

Puskesmas mempunyai peran sebagai fasilitator dalam pembentukan dan pembinaan Pos UKK di wilayah kerjanya, memfasilitasi pemeriksaan pekerja secara berkala, sebagai rujukan pelayanan kesehatan kerja, menggalang dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pembinaan dan pengembangan Pos UKK, serta membangun komitmen dengan kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, perusahaan, dan sektor swasta dalam pembinaan dan pengembangan Pos UKK (Kemenkes RI, 2015).

Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk merupakan salah satu Puskesmas di wilayah kota Jakarta Barat yang telah mampu membentuk Pos UKK di wilayah kerjanya. Berdasarkan informasi dari pemegang program Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga target Pos UKK yang akan dibentuk hingga tahun 2018 adalah sebanyak 14 Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, namun target ini masih terkendala dengan proses pembentukan Pos UKK yang cukup panjang. Pada tahun 2017 berdasarkan hasil musyawarah tingkat kelurahan terbentuklah 3 Pos UKK di wilayah Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk. Program yang telah dijalankan pada ketiga Pos UKK tersebut yaitu pemeriksaan kesehatan umum kepada pekerja, manajemen risiko pekerja seperti analisis risiko pelayanan, pelaporan insiden, sosialisasi berkala mengenai keselamatan kerja. Berdasarkan data yang didapatkan dari ketiga Pos UKK tersebut Pos UKK Pasar Pos Pengumben telah memiliki 90 orang anggota dengan 4 orang kader, Pos UKK Pasar Pesing Kedoya Utara sebanyak 85 orang anggota dengan 3 orang kader dan Pos UKK PT Tirta Inti Pratama sebanyak 500 orang anggota dengan 1 orang kader. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai implementasi program Pos UKK terintegrasi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk pada tahun 2017 data yang didapatkan dari ketiga Pos UKK tersebut Pos UKK Pasar Pos Pengumben telah memiliki 90 orang anggota dengan 4 orang kader, Pos UKK Pasar Pesing Kedoya Utara sebanyak 85 orang anggota dengan 3 orang kader dan Pos UKK PT Tirta Inti Pratama sebanyak 500 orang anggota dengan 1 orang kader. Untuk mewujudkan masyarakat pekerja yang sehat dan produktif diperlukan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan kerja, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, peningkatan kemampuan masyarakat pekerja untuk menolong diri sendiri, dan mendekatkan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh kader. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin

Universitas Esa Unggul

mengetahui “bagaimana implementasi Pos UKK yang telah berjalan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk tahun 2017”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017 dilihat dari input (Kebijakan dan pedoman mengenai Pos UKK, pembentukan organisasi Pos UKK, ketenagaan, sarana prasarana dan pendanaan)?
2. Bagaimana implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017 dilihat dari proses (Pembinaan /pemantauan dan evaluasi dari Puskesmas, kegiatan pelayanan kesehatan kerja oleh kader, sistem rujukan serta pencatatan dan pelaporan)?
3. Bagaimana implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017 dilihat dari output yaitu hasil implementasi Pos UKK terintegrasi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tahun 2017

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengkaji implementasi Pos Upaya Kesehatan Kerja di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017 dilihat dari input (Kebijakan dan pedoman mengenai Pos UKK, pembentukan Organisasi Pos UKK, ketenagaan, sarana prasarana dan pendanaan).
2. Mengetahui implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun

2017 dilihat dari proses (Pembinaan/pemantauan dan evaluasi dari Puskesmas, kegiatan pelayanan kesehatan kerja oleh kader, sistem rujukan serta pencatatan dan pelaporan).

3. Mengetahui implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017 dilihat dari output yaitu Hasil Implementasi Pos UKK terintegrasi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tahun 2017

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Puskesmas dan Pos UKK

1. Memberikan informasi mengenai implementasi pelaksanaan program Pos UKK yang dilaksanakan oleh kader.
2. Memberikan bahan masukan mengenai pelaksanaan Pos UKK.

1.5.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Menjadi referensi untuk dikembangkan pada peneliti selanjutnya khususnya mengenai Pos Upaya Kesehatan Kerja.
2. Meneliti faktor lain dalam implementasi program Pos UKK di Puskesmas

1.5.3 Bagi Fakultas

1. Menambah studi kebendaharaan dan bahan informasi mengenai Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).
2. Memberikan masukan atau informasi dalam mengembangkan keilmuan K3 mengenai Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Pos Upaya Kesehatan Kerja di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk tahun 2017 yaitu Pos UKK Pasar Pos Pengumben, Pos UKK Pasar Pesing Kedoya Utara dan Pos UKK PT. Tirta Varia Intipratama. Penelitian dilakukan pada

Universitas Esa Unggul

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program Kesehatan Kerja Sudinkes Kota Jakarta Barat, Penanggung jawab program Kesehatan Kerja Puskesmas serta Kader dari 3 Pos UKK sebanyak 3 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program Pos UKK apakah sudah sesuai dengan Permenkes No. 100 tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja terintegrasi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik penelitian dengan *in depth interview*, observasi, serta telaah dokumen. Waktu penelitian adalah bulan Januari tahun 2018.